



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

HIGHLIGHTS

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pendapatan

Pemerataan Pendapatan

LOKASI PENELITIAN

DAS Konto, berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada ketinggian antara 600-2800 m dpl. Luas wilayahnya kurang lebih 233 km², mencakup dua kecamatan, yaitu Pujon dan Ngantang, yang di dalamnya terdapat 20 desa.

Di bagian hilir sungai terdapat waduk seluas 260 ha yang terbentuk sesudah dibangunnya DAM Selorejo pada tahun 1970, dan memberikan berbagai manfaat.

Kecamatan Ngantang terletak di sebelah barat Kota Batu dengan luas wilayah 147,97 km², terdiri dari 13 desa.

Kecamatan Pujon memiliki luas wilayah 119.45 km² atau 2,61% dari total luas Kabupaten Malang, yaitu 4.576 km².

Hasil penelitian ini merupakan bagian dari proyek yang didanai oleh

FORD FOUNDATION

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Upaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan & Pemerataan Pendapatan Petani Miskin di Sekitar Hutan



Pulau Jawa memiliki luasan hanya 6% dari luas wilayah Indonesia, akan tetapi sebagian besar (70%) penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 230 juta jiwa, tinggal di Pulau Jawa. Lebih dari 60% penduduk perdesaan di Jawa bergantung pada pertanian yang merupakan sumber pendapatan utama. Sebagian besar penduduk perdesaan tinggal di sekitar hutan dan tergolong miskin dengan rata-rata kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektar per rumah tangga, sehingga tingkat pendapatan mereka rendah. Akibatnya terjadi tekanan pada pertumbuhan sosial dan ekonomi di daerah sekitar hutan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak yang cukup besar terhadap kemiskinan, hingga mencapai dua kali lipat, dari 11% pada tahun 1990 menjadi 20% selama krisis (Agustus-September 1998). Pada waktu krisis, banyak masyarakat yang kembali ke desa karena pengurangan tenaga kerja di sektor industri.

Sementara itu, lahan pertanian yang tersedia di desa sangat terbatas, sehingga menyebabkan masyarakat mulai mengusahakan lahan hutan negara. Akan tetapi akses ke hutan

negara tersebut juga sangat terbatas, karena lebih dari 50% wilayah hutan di Pulau Jawa dikelola oleh Perum Perhutani. Namun karena kebutuhan hidup yang terus mendesak, masyarakat perdesaan tetap mencoba mengakses dan menggunakan wilayah hutan tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan Perum Perhutani di hampir seluruh wilayah propinsi di Pulau Jawa.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Perum Perhutani sebagai BUMN yang diberi mandat untuk mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli dengan masyarakat miskin sekitar hutan.

Sejalan dengan terjadinya reformasi dibidang kehutanan, Perum Perhutani menyempurnakan sistem pengelolaan



sumberdaya hutan dengan membentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini dilaksanakan dengan prinsip bersama, berdaya dan berbagi dalam hal pemanfaatan lahan, waktu dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Dalam pelaksanaannya, PHBM melalui Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) seperti yang ada di Kecamatan Ngantang dan Pujon, Kabupaten Malang, telah menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pengembangan ekonomi lokal, yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadi anggota PHBM.

Masyarakat peserta PHBM di dua kecamatan ini dapat memanfaatkan lahan perhutani untuk bercocok tanam secara tumpangsari dengan tanaman sayur-sayuran. Seluruh hasil dari tanaman sayur-sayuran dipanen oleh penggarap (petani). Pemasaran hasilnya pun sangat mudah, yaitu melalui pedagang pengepul yang datang ke lokasi. Selain hasil panen dari tanaman sayur-sayuran, mereka juga dapat menanam tanaman pakan ternak, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi alternatif seperti ternak sapi perah.

Pendapatan

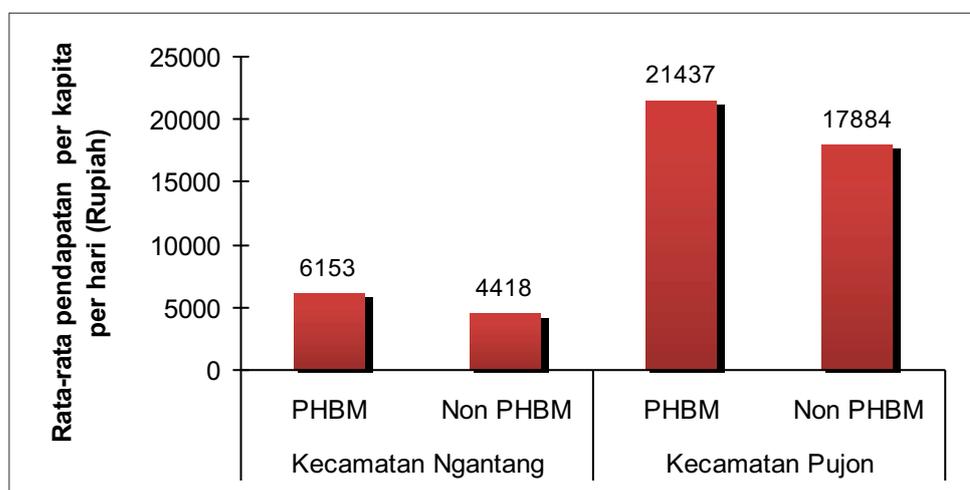
Pendapatan masyarakat di Kecamatan Ngantang dan Pujon bersumber dari pengelolaan lahan pertanian di lahan Perhutani yang berupa ladang atau tegalan, lahan pertanian milik sendiri berupa sawah, ladang dan kebun, ternak sapi dan pekerjaan lainnya seperti usaha, upah dan lainnya.

Rata-rata pendapatan per kapita per hari di Kecamatan Pujon yang diwakili oleh Desa Tawang Sari jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan di Kecamatan Ngantang yang diwakili oleh Desa Ngantru seperti disajikan pada Gambar 1.

Rata-rata pendapatan per kapita per hari petani yang ikut program PHBM di kedua kecamatan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan yang tidak ikut program. Di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantang rata-rata pendapatan per kapita per hari petani anggota PHBM sebesar Rp. 6.153 (0.68 US \$), sedangkan petani bukan anggota PHBM hanya sebesar Rp. 4.418 (0.49 US \$). Hal ini membuktikan bahwa program PHBM dapat meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita per hari sebesar Rp. 1.735 (39%) bagi masyarakat yang ikut program PHBM di Kecamatan Ngantang.

Demikian pula yang terjadi di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon dengan rata-rata pendapatan per kapita per hari Rp. 21.437 (2.38 US \$) bagi anggota PHBM dan Rp. 17.884 (1.99 US \$) bagi petani bukan anggota PHBM.

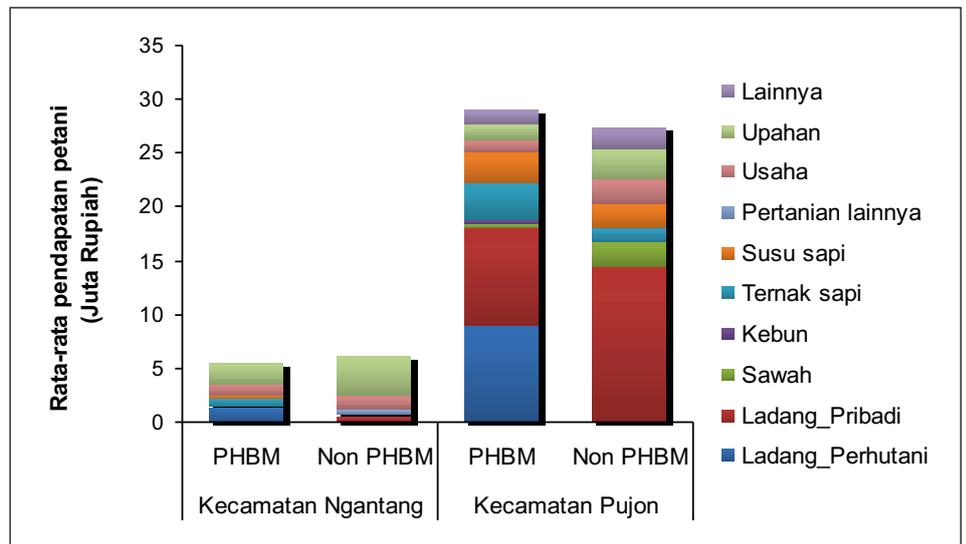
Meskipun demikian, peningkatan rata-rata pendapatan per kapita petani peserta program PHBM di Kecamatan Pujon lebih kecil bila dibandingkan dengan di Kecamatan Ngantang, yaitu 20% atau sebesar Rp. 3.553.



Gambar 1. Rata-rata pendapatan per kapita per hari masyarakat di Kecamatan Ngantang (Desa Ngantru) dan Kecamatan Pujon (Desa Tawang Sari)



Dengan menggunakan standar garis kemiskinan internasional sebesar 1 US \$ per kapita per hari, maka petani di Kecamatan Ngantang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan petani di Kecamatan Pujon termasuk sejahtera karena memiliki rata-rata pendapatan per kapita per hari lebih dari 1.55 US \$. Walaupun petani di Kecamatan Ngantang tergolong lebih miskin dibandingkan petani di Kecamatan Pujon, tetapi mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang lebih baik.



Gambar 2. Rata-rata pendapatan petani di Kecamatan Ngantang dan Pujon berdasarkan sumber pendapatannya

Perbedaan rata-rata pendapatan per kapita antara petani PHBM dengan petani non PHBM di kedua kecamatan, yaitu 39% di Kecamatan Ngantang dan 20% di Kecamatan Pujon belum memasukkan pendapatan dari bagi hasil (*sharing*) kayu, karena pohon yang dipelihara oleh petani di lahan yang mereka kelola belum mencapai umur panen. Perbedaan tersebut hanya berasal dari hasil tumpangsari tanaman pangan atau tanaman sayuran.

lahan Perhutani mencapai 33% dari total pendapatan, dan di Kecamatan Pujon mencapai 45% (gambar 2).

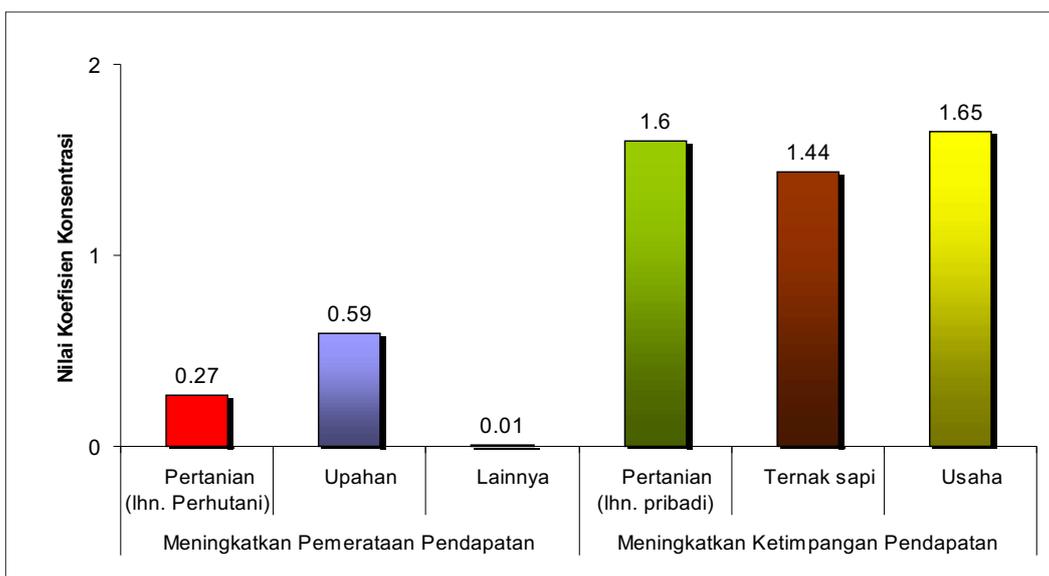
Namun demikian, petani peserta program PHBM telah merasakan adanya peningkatan pendapatan dan mereka berharap pendapatan tersebut akan lebih meningkat dengan diijinkannya mengelola lahan Perhutani dan mendapat bagi hasil kayu pada saat dipanen.

Pemerataan Pendapatan

Pendapatan dari sektor pertanian di lahan Perhutani yang dikelola masyarakat terbukti mengurangi ketimpangan atau meningkatkan pemerataan pendapatan, baik bagi petani di Kecamatan Pujon maupun di Kecamatan Ngantang.

Pendapatan dari sektor pertanian pada lahan milik negara (lahan Perhutani) berperan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi pendapatan petani dari lahan Perhutani. Di Kecamatan Ngantang proporsi pendapatan petani dari ladang di

Sumber pendapatan tertentu berperan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan bila nilai koefisien konsentrasi kurang dari satu. Sebaliknya bila nilai koefisien konsentrasi lebih dari satu, maka sumber pendapatan itu berperan dalam meningkatkan ketimpangan pendapatan (gambar 3).



Gambar 3. Sumber Pendapatan yang Mempengaruhi Tingkat Pemerataan dan Ketimpangan Pendapatan di Kecamatan Ngantang

Dari hasil analisis kepemilikan lahan, baik di Kecamatan Pujon maupun di Kecamatan Ngantang, distribusi kepemilikan lahan relatif merata. Pengelolaan lahan Perhutani menyebabkan meningkatnya pemerataan kepemilikan lahan atau lahan Perhutani yang dikelola masyarakat relatif terdistribusikan secara merata.

Lahan Perhutani relatif lebih tersedia atau mudah diakses bila dibandingkan dengan lahan pribadi. Ini membuktikan bahwa lahan Perhutani merupakan sumber kepemilikan lahan yang sangat penting bagi petani miskin khususnya yang tidak memiliki lahan garapan di lahan pribadi, karena pada umumnya lahan ini dapat dikelola petani tanpa harus membayar, bahkan ada pembagian (ijin mengelola) dari Perhutani kepada masyarakat sebagai wujud dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Sementara itu, penguasaan lahan pribadi menyebabkan meningkatnya ketimpangan kepemilikan lahan, karena lahan pribadi tersebut semakin diperluas melalui pembelian, dan hanya masyarakat yang mampu yang dapat membeli lahan.



Program PHBM Skala Nasional

PHBM: Program untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nasional

Perum Perhutani telah melaporkan beberapa keberhasilan program PHBM dalam mengatasi kemiskinan masyarakat antara lain:

- Sejak dicanangkannya program PHBM tahun 2001 telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4,02 juta orang dan mampu memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 1,4 triliun.
- Sampai dengan Desember 2008 telah terbentuk 5.165 desa PHBM atau 95% dari jumlah desa hutan atau desa yang berbatasan dengan hutan yaitu 5.415 desa dengan luas pangkuan wilayah sekitar 1.992.424,58 ha dan melibatkan \pm 5.040.760 Kepala Keluarga.
- Salah satu prinsip PHBM adalah berbagi/sharing. Sharing adalah bagi hasil produksi kayu dan non kayu yang diberikan kepada LMDH/LKDPH berdasarkan kontribusi dari masyarakat dalam proses produksi. Nilai sharing yang sudah diberikan kepada LMDH terus meningkat dari tahun 2002. Sampai dengan bulan Desember 2008 jumlah sharing yang diberikan mencapai Rp. 127,759 milyar yang berasal dari hasil produksi kayu dan non kayu (seperti getah pinus, kopi, cengkeh, galian C, dan sebagainya) dengan perincian: sharing dari kayu sebesar Rp. 63,45 milyar dan dari non kayu sebesar Rp. 64,28 milyar.
- Selain bagi hasil produksi, dalam implementasinya sejak tahun 2001 program PHBM telah memberikan kontribusi hasil pangan bagi Gross Domestic Bruto (GDP) yang dinikmati LMDH/LKDPH dengan jenis komoditi padi, jagung, kacang-kacangan, dan hasil pangan lainnya. Dari tahun 2001 sampai dengan bulan Desember 2008 tercatat hasil pangan yang dihasilkan 5,72 juta ton dengan nilai sebesar Rp. 5,83 triliun.

(Sumber: <http://www.perumperhutani.com/index.php?Itemid=49>)



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Noviana Khususiyah

World Agroforestry Centre – ICRAF
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 8625415; Fax: +62 251 8625416
E-mail: n.khususiyah@cgiar.org

Laporan singkat ini disusun oleh:
Noviana Khususiyah, Suyanto dan Yana Buana
Editor: Subekti Rahayu
Layout: Yana Buana & Josef Arinto
Foto: Noviana Khususiyah dan Yana Buana